

**ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR
INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TANJUNG BALAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

**Nama : Malika Ayu
Npm : 2105170239
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MAHIKA AYO
 NPM : 2105170239
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

Dinyatakan (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tim Penguji

Penguji I

(Elizar Sihambela S.E., M.Si)

Penguji II

(M. Izza Alpi, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Muhammad Fahmi Panjaitan S.E., M.Si, Ak., CA, aCPA)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Jamuri, S.E., M.M., M.Si, CA, CPA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MALIKA AYU
N.P.M : 2105170239
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR
INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 20 Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(MUHAMMAD FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., AK., CA., aCPA)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Asst. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



JMSU
UIN (Cendekia) Negeri

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Malika Ayu
NPM : 2105170239
Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., AK., CA., aCPA.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pendahuluan, Rumusan. pendahuluan.	2/2-25	
Bab 2	Tinjauan teori pendahuluan.	2/2-25	
Bab 3	Model penelitian.	2/2-25	
Bab 4	Hasil dan pembahasan penelitian.	2/2-25	
Bab 5	Kesimpulan penelitian.	2/2-25	
Daftar Pustaka	Referensi Model.	2/4-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	OK 2/3-25.	2/4-25	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Zulia Hanan, S.E., M.Si.

Medan, 30 Maret 2025

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., AK., CA., aCPA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : MALIKA AYU

N.P.M : 2105170239

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI
AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



MALIKA AYU

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

Malika Ayu

Program Studi Akuntansi

Email: malikaayu2209@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung balai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tanjung balai telah berperan penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung balai yang dimana sebelumnya Pemerintah Daerah Kota Tanjung balai mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2022 dan 2023 menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2024 dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal pelaksanaan pengawasan pemeriksaan, dan evaluasi tindak lanjut. Begitu juga dengan pelaksanaan review atas laporan keuangan yang mulai dilakukan dan ditingkatkan lebih baik dalam pelaksanaannya serta peningkatan dalam hal pembinaan atau konsultasi kepada audit dan Satuan Kerja Perangkat Dinas dalam pemerintahan kota Tanjung balai

Kata kunci : Auditor Internal, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INSPECTORATE AS AN INTERNAL AUDITOR OF THE GOVERNMENT IN IMPROVING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE LOCAL GOVERNMENT OF TANJUNG BALAI CITY

*Malika Ayu
Accounting Study Program
Email: malikaayu2209@gmail.com*

The purpose of this study is to determine the role of the Tanjung Balai City Inspectorate in improving the quality of the financial reports of the Tanjung Balai City Government. This study uses a descriptive research type using a qualitative approach. Data were obtained from interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the Tanjung Balai City Inspectorate has played an important role in improving the quality of the financial reports of the Tanjung Balai City Government, where previously the Tanjung Balai City Government received a Fair Opinion with Exceptions in 2022 and 2023 to a Fair Opinion without Exceptions in 2024 by improving work in terms of implementing supervision of inspections, and evaluation of follow-up actions. Likewise, the implementation of the review of financial reports that has begun to be carried out and has been improved in its implementation as well as improvements in terms of coaching or consultation with auditees and Work Units of the Service Apparatus in the Tanjung Balai City government.

Keywords ; Internal auditor, financial reporting quality

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan mengucapkan syukur rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW, Yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul “ Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai ”

Bagi penulis, penyusunan tugas akhir ini merupakan tugas yang tidak ringan, penulis menyadari banyaknya hambatan dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan tentulah karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Yang paling utama penulis ucapkan terimakasih kepada ibunda penulis yang telah memberikan dukungan serta arahan agar penulis tetap menulis tugas akhir ini dengan baik, selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda penulis yang selalu memberika motivasi agar penulis giat dalam menulis tugas akhir. Selanjutnya penulis

ucapkan terimakasih kepada abang kandung penulis Nauval aviv dan Diwa al akbar yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu penulis tak lupa sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktu serta bantuannya, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si., CMA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak., CA., CPA**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA**, selaku dosen pembimbing mata kuliah tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh **Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Seluruh **Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada **Kantor Inspektorat Kota Tanjung Balai**, sebagai Lembaga Negara yang telah menyediakan data yang dapat penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Dan teman teman penulis **Alifya Safara**, yang telah memberikan semangat, dukungan dan telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dan teman- teman seperjuangan lainnya.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan do'a yang tulus dan ikhlas semoga amal baik mereka diterima dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Tidak lupa pula saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Medan, Januari 2025

Malika Ayu
NPM. 2105170239

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Uraian Teori	11
2.1.1. Audit Internal	11
2.1.1.1 Pengertian Audit Internal	11
2.1.1.2 Peran Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan	11
2.1.1.3 Standar Profesi Auditor Internal.....	14
2.1.1.4 Tahap-Tahap Audit Internal.....	15
2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance).....	17
2.1.2.1 Standar Audit yang Diterapkan	18
2.1.2.2 Independensi Auditor	18
2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif	19
2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance).....	20
2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal dalam Konsultasi Jaminan.....	22
2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintahan.....	23
2.1.4.1 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka berpikir	32

2.3.1 Inspektorat Kota Tanjung balai	32
2.3.2 Audit Internal	32
2.3.3 Quality Assurance (Penjamin Mutu).....	33
2.3.4 Consulting Assurance (Pemberi Masukan)	33
2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tanjung Balai.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional	36
3.2.1 Subjek	36
3.2.2 Objek.....	36
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.3.1 Tempat Penelitian.....	37
3.3.2 Waktu Penelitian	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4.1 Jenis Data	37
3.4.2 Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.6.1 Statistik Deskriptif	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian	42
4.2. Pembahasan.....	47
4.2.1. Peranan Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan keuangan	47
4.2.2. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Kualitas laporan keuangan	52
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Tanjung balai	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian	34
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	31
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi Negara yang menerapkan otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Dimana dalam melaksanakan wewenangnya diharapkan mampu mengatur dan mampu mengurus rumah tangga daerahnya sehingga dikontrol dengan baik di pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memang secara langsung diharapkan mampu mengelola keuangan dalam melaksanakan pemerintahan. Dimana setiap tahun anggaran diharapkan pemerintah daerah mampu membuat atau menyusun laporan keuangan dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pada daerah sebagai pengguna anggaran.(Ekonomi et al., 2024)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) yang telah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor: Per- 1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran pengelolaan keuangan daerah. Wujud dari pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah itu adalah prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setelah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diserahkan kepada DPR atau DPRD serta diperiksa oleh lembaga pengawas eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian juga diperlukan unit internal dalam organisasi pemerintahan pusat dan daerah yang bertugas untuk menjamin bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengawasan intern dalam organisasi pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik karena untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik.(Ihsan, 2018).

Unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah, inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Tugas lain dari inspektorat sendiri ialah diharapkan mampu melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan SAP sebelum disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah melakukan *review* atas Laporan Keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan *review* tersebut, diharapkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat diturunkan. Maka dari itu inspektorat merupakan hal utama dan penting dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Peran inspektorat sebagai audit internal pemerintah juga tidak terbatas pada pengawasan tetapi juga pembinaan/konsultasi disamping melakukan *review*.(Ihsan, 2018).

Adanya paradigma baru saat ini, inspektorat daerah tidak lagi hanya berperan sebagai *watchdog* yang hanya berfokus pada penemuan penyimpangan atas pemeriksaan ketaatan dan keuangan tetapi juga mengedepankan peran sebagai konsultan pendamping dan *quality assurance*. Hal tersebut tentunya dapat bermanfaat berupa rekomendasi perbankan terhadap masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan demikian Inspektorat memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat daerah mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Maulana, 2021).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu: perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan pemeriksaan pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kemudian, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan (Sunarsih et al., 2021)

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa karakteristik kuantitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kuantitatif laporan keuangan ini meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemriksaan Keuangan yang dimana opini WTP diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu SAP, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas (Sunarsih et al., 2021).

Tabel 1-1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung balai

LKPD Anggaran Tahun	Opini Audit	Pernyataan
2022	WDP	Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya : 1. Adanya kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan berdampak pada lebih saji asset jalan, irigasi dan jaringan; 2. pengamanan asset tetap dan asset lain – lain belum tertib antara lain mengakibatkan risiko terjadinya sengketa atas tanah yang belum bersertifikat.
2023	WDP	Masih terdapat Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya : 1. Adanya permasalahan dalam belanja modal jalan,jaringan dan irigasi merupakan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan kepada penyedia barang dan jasa; 2. Terdapat asset tetap yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan asset peralatan dan mesin.
2024	WTP	Melakukan Perbaikan Sistem Pengendalian Internal. Pemerintah Kota Tanjungbalai kemungkinan telah melakukan perbaikan signifikan terhadap sistem pengendalian internal yang sebelumnya menjadi kelemahan di tahun 2022 dan 2023. Kelemahan ini termasuk dalam pengelolaan dan pemantauan belanja

		modal, serta pengelolaan aset tetap. Dengan adanya perbaikan dalam pengendalian internal, kemungkinan besar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan.
--	--	---

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kota Tanjung balai dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan , disebutkan bahwa pada data tahun 2022 pemerintahan kota tanjung balai mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, begitu pula pada tahun 2023 pemerintahan kota Tanjung balai masih mendapatkan wajar dengan pengecualian. Selama dua tahun tersebut pemerintahan kota Tanjung balai masih belum mendapatkan opini yang terbaik berupa wajar dengan pengecualian dalam kualitas laporannya, sehingga pada tahun 2024 mengalami kemajuan yang dimana pemerintahan kota Tanjung balai akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dapat diketahui bahwa inspektorat kota Tanjung balai dapat merubah tata cara, perencanaan dan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan penilaian tertinggi dalam kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menganalisis perbedaan peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena berdasarkan hasil audit yang diperiksa oleh BPK terdapat perbedaan pendapat dalam opini yang diberikan yang berupa semula mendapatkan WDP di tahun 2022,2023 dan pada tahun 2024 ,meningkat menjadi opini WTP sehingga

terdapat pula perbedaan peranan yang dilakukan Badan Inspektorat Kota Tanjung balai, berdasarkan perbedaan hasil audit laporan keuangan itulah peneliti tertarik untuk melihat perbedaan seperti apa yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai sehingga laporan keuangan yang diperiksa dapat mengalami peningkatan kualitas yang lebih baik berupa mendapat opini WTP pada tahun 2024. Karena berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri disebutkan bahwa inspektorat melakukan pengawasan intern melalui kegiatan audit, *review*, evaluasi, dan pemantauan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas laporan keuangan.

Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Diharapkan, pencapaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang. dengan adanya perubahan opini ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta menegaskan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan benar-benar membuahkan hasil yang positif (Fallis, 2013).

Sehingga dalam hal ini peneliti ingin menganalisis apakah Inspektorat memiliki andil dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan karena Inspektoratlah yang memeriksa sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menyempurnakan laporan keuangan daerah dengan memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang seharusnya dilakukan pada laporan keuangan daerah. Adanya internal audit selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah

diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menganalisis perbedaan peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena berdasarkan hasil audit laporan keuangan terdapat peningkatan opini yang diberikan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai diharapkan melaksanakan fungsi evaluasi, rekomendasi, dan pengawasan pada laporan keuangan sehingga dapat diperiksa oleh BPK agar mendapatkan laporan keuangan daerah kualitas yang baik dan memiliki kewajaran laporan keuangan daerah, maka dari itu penelitian ini diberi judul : “ Analisis Peranan Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung balai ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah di Kota Tanjungbalai sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat diandalkan.
2. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat dalam menilai laporan keuangan apakah kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi hasil kualitas audit karena Kualitas laporan

keuangan yang rendah dapat berisiko pada kesalahan dalam perencanaan atau pengalokasian anggaran.

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menganalisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung balai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Kota Tanjung balai untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan pada penelitian ini:

1. Untuk menganalisis peranan instansi Badan Inspektorat Kota Tanjung balai menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dihadapi oleh instansi Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini secara akademis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kajian bidang audit internal pemerintah.
 - b. Mengembangkan pengetahuan tentang pentingnya kualitas laporan Keuangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan mengenai peranan inspektorat dalam Instansi pemerintahan.
 - b. Dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal menurut Hiro Tugiman (2006) adalah sebagai berikut:

“ Internal Auditing atau Audit Internal adalah suatu penilaian fungsi independen yang dibuat yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”.

Audit internal sebagai fungsi penilai independen yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi. Audit internal merupakan tonggak utama dalam mendukung keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, serta efisiennya terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang ada. Tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam organisasi yaitu melalui perbaikan manajemen risiko terhadap integrity risk yang akan timbul dalam organisasi melalui identifikasi ataupun meminimalisirnya. Keandalan informasi keuangan dan operasi merupakan salah satu kriteria yang dimasukkan dalam proses audit internal (Syarifudin Akhmad, 2014)

2.1.1.2 Peran Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan

Inspektorat merupakan lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintahan yang memiliki tugas utama untuk memastikan pengelolaan

keuangan dan kinerja pemerintah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai auditor internal pemerintahan, inspektorat memiliki berbagai peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Rahman, 2020). Berikut adalah beberapa peran utama inspektorat :

1. Melakukan Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi utama inspektorat dalam mengawasi dan menilai apakah pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit internal yang dilakukan inspektorat mencakup beberapa jenis, antara lain:

1. Audit Keuangan yaitu Memeriksa laporan keuangan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Audit Kinerja yaitu Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan.
3. Audit Kepatuhan yaitu Memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan aturan telah dipatuhi oleh seluruh pegawai dan unit kerja dalam pemerintahan.

Hasil dari audit internal ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, menemukan potensi penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan oleh instansi terkait.

2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern

Sebagai pengawas internal, inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran dalam pemerintahan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, dan kesalahan

dalam pengelolaan sumber daya negara.

Selain itu, inspektorat juga bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian internal. Pengendalian ini meliputi berbagai langkah yang diterapkan untuk meminimalkan risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan, seperti risiko korupsi, pemborosan anggaran, serta ketidakefektifan dalam pelaksanaan program pemerintah.

3. Mencegah dan Menindak Pelanggaran

Salah satu peran penting inspektorat adalah sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam pemerintahan, termasuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi anggaran.

Inspektorat akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses audit maupun laporan dari masyarakat. Jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran, inspektorat akan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan serta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang, seperti Aparat Penegak Hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila diperlukan.

Selain tindakan korektif, inspektorat juga berperan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada aparatur sipil negara (ASN) mengenai pentingnya menjalankan tugas dengan integritas serta mematuhi aturan yang berlaku.

4. Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Setelah melakukan audit dan pengawasan, inspektorat memiliki tugas untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan instansi terkait. Rekomendasi ini biasanya mencakup aspek keuangan, administrasi, kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang perlu

ditingkatkan.

Rekomendasi dari inspektorat sangat penting dalam proses perbaikan sistem pemerintahan. Dengan adanya rekomendasi ini, pemerintah dapat melakukan tindakan perbaikan yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas serta menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang.

5. Melakukan Pembinaan dan Konsultasi

Selain melakukan audit dan pengawasan, inspektorat juga berperan dalam memberikan pembinaan serta konsultasi kepada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas pegawai dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat meliputi:

- 1. Sosialisasi aturan dan kebijakan terbaru** yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan.
- 2. Pelatihan dan workshop** untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang pengawasan, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi.
- 3. Pendampingan dan konsultasi** bagi unit kerja yang memerlukan bimbingan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih baik.

2.1.1.3 Standar Profesi Auditor Internal

Menurut (AAIPI, 2013: 10-14) standar profesi auditor internal terbagi menjadi dua standar pokok, yaitu:

- 1) Independensi dan Objektivitas Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi adalah

kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, maka pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional dan organisasi.

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi atas kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan judgement-nya terkait audit terhadap orang lain. Ancaman terhadap objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional dan organisasi.

- 2) Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

2.1.1.4 Tahap-Tahap Audit Internal

Tahap pekerjaan audit internal menurut (Tunggal, 2012: 120) terdiri atas enam proses:

- 1) Audit Perencanaan dan Analisis resiko

Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting

dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

2) Preliminary Survey

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.

3) Audit Kerja Lapangan

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit

4) Temuan Audit dan Rekomendasi

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat empat poin penting dalam tahap ini: mengembangkan temuan audit, mendokumentasikan temuan audit, dan melakukan penutupan (closing).

5) Reporting (Pelaporan) Reporting

merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak

yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini: outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final report.

6) Follow Up (Tindak Lanjut)

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

2.1.2 Jaminan Kualitas (Quality Assurance)

Assurance Quality pada inspektorat merujuk pada serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan, audit, atau inspeksi yang dilakukan oleh inspektorat memenuhi standar kualitas yang tinggi, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa hasil inspeksi atau audit yang dilakukan adalah akurat, objektif, dan dapat diandalkan. Dalam konteks inspektorat, QA tidak hanya fokus pada hasil akhir (seperti laporan audit atau temuan inspeksi), tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, memastikan bahwa seluruh prosedur, teknik, dan metode yang diterapkan telah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku (Media et al., 2017)

Jaminan kualitas dalam audit internal berfungsi untuk memastikan bahwa proses audit yang dilakukan oleh inspektorat sesuai dengan standar audit yang berlaku, baik dari segi metodologi, teknik audit, serta pelaporan hasil audit (Oktavia, 2019). Beberapa langkah yang terkait dengan jaminan kualitas dalam

proses audit internal meliputi :

2.1.2.1 Standar Audit yang Diterapkan

Auditor internal harus mengikuti pedoman dan standar audit yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau regulasi terkait audit internal pemerintahan. Standar audit ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, antara lain:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.

2. Pedoman Audit

Auditor harus mengacu pada pedoman audit yang mencakup aspek metodologi, teknik, dan pendekatan audit yang diterima secara luas dalam profesi auditor, baik dari sisi pengujian kepatuhan maupun pengujian substantif.

3. Kebijakan BPKP

Sebagai lembaga pengawas di sektor pemerintahan, BPKP memiliki pedoman teknis dan prosedural yang menjadi acuan auditor dalam melaksanakan tugasnya secara sistematis dan terstruktur.

2.1.2.2 Independensi Auditor

Auditor internal harus menjaga independensinya dari pengaruh eksternal atau internal agar hasil audit yang dikeluarkan tidak bias dan dapat dipercaya. Hal ini juga memastikan bahwa laporan audit bersifat objektif. Independensi adalah prinsip fundamental yang harus dijaga oleh auditor internal selama proses audit.

Hal ini berarti auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, baik itu pihak eksternal maupun internal, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas hasil audit. Beberapa faktor yang mendukung independensi auditor internal antara lain:

1. Posisi yang Terpisah

Auditor internal harus memiliki posisi yang memadai dalam struktur organisasi sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan dari pihak lain.

2. Ketidakberpihakan dalam Pengambilan Keputusan

Auditor harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil audit yang obyektif. Ini memastikan bahwa hasil audit bisa diterima dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Kontrol dan Pengawasan

Untuk menjaga independensi, auditor internal biasanya diawasi oleh suatu lembaga independen atau komite audit yang berfungsi untuk memastikan bahwa hasil audit yang dikeluarkan benar-benar objektif dan bebas dari intervensi.

2.1.2.3 Pengujian Kepatuhan dan Substantif

Audit dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pengujian kepatuhan terhadap peraturan dan pengujian substantif terhadap validitas data keuangan, sehingga dapat menjamin bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

1. Pengujian Kepatuhan

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan telah mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, maupun kebijakan internal pemerintah daerah. Auditor akan memeriksa apakah setiap transaksi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti otorisasi yang sah, kelengkapan dokumen pendukung, dan pencatatan yang tepat.

2. Pengujian Substantif

Pengujian substantif berfokus pada validitas dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini melibatkan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap transaksi tertentu untuk memastikan bahwa angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kenyataan. Auditor akan memeriksa bukti transaksi yang lebih mendetail, seperti dokumen pendukung transaksi dan bukti fisik dari aset yang tercatat.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Pengujian kepatuhan memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku diikuti dengan benar, sementara pengujian substantif memastikan bahwa laporan keuangan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2.1.3 Konsultasi Jaminan (Consulting Assurance)

Pengawasan internal yang dilakukan berfokus pada pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pengawasan yang bersifat mandatori. Peran selanjutnya yang dijalankan oleh Inspektorat dalam mengawasi pengelolaan dana desa adalah sebagai konsultan (consulting assurance). Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan, Inspektorat melakukan pendampingan, pembinaan,

dan menjadi narasumber bagi pemerintah desa. Pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat *early warning*, jadi saat penyusunan Inspektorat memberikan informasi dan pemahaman mengenai tata cara penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Secara umum pengawasan dana desa yang dilakukan oleh inspektorat sudah dilaksanakan tetapi belum memadai dikarenakan masih terdapat kendala baik itu dari internal maupun eksternal. Kendala internal adalah kekurangan SDM, kendala sistem, kendala waktu, kendala beban kerja dan keterbatasan anggaran. Kendala eksternal seperti konflik kepentingan, keterbatasan SDM, kurang kooperatifnya perangkat desa dan tidak tertib administrasi (YANA, 2023).

Konsultasi jaminan kualitas merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor internal memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Konsultasi ini berfokus pada dua aspek penting, yaitu evaluasi kualitas audit yang dilaksanakan serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan dalam proses audit dan pengelolaan keuangan (Oktavia, 2019).

Pada tingkat pemerintahan, auditor internal tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tetapi juga memberikan konsultasi kepada pejabat pemerintahan terkait proses akuntansi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tujuan dari konsultasi ini adalah agar pihak yang diaudit dapat memahami temuan audit dengan lebih baik dan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3.1 Peran Inspektorat Auditor Internal dalam Konsultasi Jaminan

Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Auditor Internal memegang peranan sangat penting dalam jaminan kualitas. Proses audit yang mereka lakukan tidak hanya sebatas mencari kesalahan atau ketidaksesuaian, tetapi juga berfungsi sebagai konsultan yang memberikan masukan terkait perbaikan proses-proses yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa bentuk peran Inspektorat dalam konsultasi jaminan kualitas adalah:

1. Memberikan Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Inspektorat tidak hanya terbatas pada menemukan kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga memberikan rekomendasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Misalnya, jika ada area dalam laporan keuangan yang kurang jelas atau sulit dipahami, inspektorat dapat memberikan saran untuk memperbaiki cara penyajian data agar lebih mudah dimengerti oleh publik dan pihak-pihak terkait.

2. Meningkatkan Pengendalian Internal

Salah satu tugas Inspektorat adalah mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal yang ada di pemerintah daerah, seperti proses-proses yang dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Melalui konsultasi ini, Inspektorat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, seperti peningkatan prosedur verifikasi, otorisasi, serta dokumentasi transaksi keuangan yang lebih kuat.

3. Menjamin Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Inspektorat memiliki peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan

daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan SAP, Inspektorat dapat memberikan konsultasi untuk memperbaiki dan memastikan bahwa laporan keuangan berikutnya mematuhi ketentuan ini.

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Konsultasi dalam hal ini juga melibatkan pemberian pelatihan atau pengembangan bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Indikator Kualitas Audit Pemerintahan

Audit dalam pemerintahan berperan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar audit pemerintahan berkualitas (Kharisma Hardiyanti & Kania Nurcholisah, 2023). Ada beberapa indikator utama yang harus dipenuhi auditor internal yaitu :

1. Kepatuhan terhadap Standar Audit Pemerintahan

Audit pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti:

1. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang mengatur tata cara pelaksanaan audit internal dalam pemerintahan.
2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan laporan keuangan instansi pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) yang merupakan standar internasional dalam audit sektor publik yang dikeluarkan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).

2. Independensi dan Objektivitas Auditor

Independensi merupakan prinsip utama dalam audit yang menentukan sejauh mana auditor dapat bekerja tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain. Jika auditor tidak independen, maka hasil audit bisa saja menjadi bias dan tidak objektif.

Untuk menjamin independensi, auditor tidak boleh memiliki hubungan kepentingan dengan entitas yang diaudit, baik dalam bentuk hubungan kerja, keuangan, atau politik. Selain itu, auditor harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menilai laporan keuangan serta kinerja instansi yang diperiksa.

3. Perencanaan Audit yang Matang dan Berbasis Risiko

Perencanaan yang baik merupakan kunci dalam memastikan audit dapat berjalan efektif. Dalam audit pemerintahan, perencanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk identifikasi area berisiko tinggi, pemilihan metode audit yang tepat, serta penyusunan strategi pemeriksaan yang komprehensif.

Audit berbasis risiko memastikan bahwa auditor dapat memfokuskan pemeriksaan pada area yang memiliki potensi penyimpangan atau kelemahan terbesar, seperti sektor yang sering mengalami korupsi atau pemborosan anggaran.

4. Kecukupan Bukti Audit

Bukti audit adalah dasar dari setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Oleh karena itu, bukti yang dikumpulkan harus valid, relevan, dan

cukup untuk mendukung kesimpulan yang dibuat dalam laporan audit.

Bukti audit dapat berupa dokumentasi, wawancara, observasi, atau pengujian langsung terhadap data keuangan dan operasional. Auditor harus memastikan bahwa bukti tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi.

5. Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Audit

Laporan audit harus diselesaikan dan disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu ini penting agar hasil audit dapat segera digunakan oleh pihak terkait untuk perbaikan dan pengambilan keputusan.

Keterlambatan dalam penyelesaian audit dapat mengurangi efektivitasnya, terutama jika temuan audit terkait dengan kebijakan yang membutuhkan tindakan cepat.

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Suherman, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Andini, 2016)

2.1.4.1 Review atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Definisi Review

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat kabupaten/kota sebagai Aparat

Pengawas Intern Pemerintah wajib melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD (Atiin et al., 2022)

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa APIP pada provinsi/kabupaten/kota (inspektorat) wajib melakukan reuiu atas LKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Berdasarkan Permenkeu Nomor 8/PMK.09/2015 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reuiu atas LKPD didefinisikan sebagai penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas (Mardika, 2021).

1. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan review, aparat pengawasan intern perlu melakukan persiapan-persiapan agar review dapat dilaksanakan secara efektif dan terpadu. adapun persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan review.

2. Pengumpulan informasi keuangan

Aparat pengawas intern perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti laaporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan.

3. Persiapan penugasan

Penugasan review perlu persiapan yang memadai antara lain penyusunan tim review. tim review secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan review disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan di masing-masing kementerian/lembaga. Penugasan program kerja review, tim yang ditugaskan untuk melakukan review perlu menyusun program kerja review yang berisi langkah-langkah dan teknik review yang akan dilakukan selama proses review, sebagai berikut:

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan review atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik review sebagai berikut :

- a. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan dalam melaksanakan review aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.
- b. Permintaan keterangan, yang dilakukan dalam review atas laporan keuangan bergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern.

5. Pelaporan

Laporan hasil review memuat masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi untuk pelaksanaan koreksi, dan koreksi yang telah dilakukan oleh entitas yang direview.

6. Tindak lanjut

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawas intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindak lanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Istiqomah (2020) Peran Internal audit membantu organisasi dalam usaha mencapai Kualitas Laporan Keuangan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Terdapat empat elemen auditor internal yang merupakan standar profesional audit internal yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.

Menurut Ihsan,M.H. (2018) untuk mengetahui peranan Inspektorat Kota Prabumulih atas laporan keuangan pemerintahan daerah kota Prabumulih penelitian ini menggunakan jenis penelitian model kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat kota Prabumulih telah berperan penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kota

Prabumulih yang di mana sebelumnya pemerintah daerah kota Prabumulih mendapat opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan menjadi opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2013 dengan melakukan peningkatan kerja dalam hal pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut. Begitu juga dengan pelaksanaan review atas laporan keuangan yang dilakukan dan ditingkatkan lebih baik dalam pelaksanaannya serta peningkatan dalam hal pembinaan atau konsultasi kepada Allah dan satuan kerja perangkat dalam pemerintahan kota Prabumulih .

Menurut Sipayung (2021) “Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”. Laporan keuangan daerah adalah suatu ringkasan dari suatu proses, pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dan publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berpengaruh signifikan terhadap menjaga kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Lakoro (2024) Dalam mengetahui kualitas audit laporan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan hasil penelitian bahwa Auditor

yang berkompeten dalam melaksanakan audit keuangan di Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo secara ideal memahami standar pemerintahan pada daerah, Tekanan waktu tidak akan memberikan gangguan pada kualitas audit keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo, Pengalaman kerja terbukti memberikan pengaruh pada tingkat kualitas analisis keuangan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo, Etika auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan audit mencakup etika kelembagaan, Independensi auditor dalam melaksanakan audit dilaksanakan dengan baik tetapi independensi hasil yang meliputi respon terhadap hasil audit belum menunjukkan hasil yang sangat baik.

Menurut Moermahadi Soerja (2020) Pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Kualitas audit diukur dengan proksi tingkat penyelesaian atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit, meliputi tiga faktor yaitu permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian pelaksanaan anggaran, struktur pengendalian intern, dan factor ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kualitas LKPD diukur dengan proksi opini audit.

Berikut ini tabel ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Audit Internal dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Istiqomah, N., Badar, M., & Wahid, A. (2022)	“Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Metode Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas

		Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep”		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep.
2.	Ihsan,M.H. (2018)	“Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih”	Metode Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih .
3.	Sipayung, Y. A., & Morasa, J. (2021)	“Evaluasi Audit Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Tomohon ”	Metode pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan yang efektif dan efisien dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah dengan cara membandingkan badan keuangan daerah dengan laporan keuangan daerah konsolidasi.
4.	Lakoro, F. S. (2024)	“Analisis Kualitas Audit Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo”	Metode pendekatan kualitatif	Pengalaman kerja terbukti memberikan pengaruh pada tingkat kualitas analisis keuangan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo.
5.	Moermahadi Soerja(2020)	“Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”	Metode pendekatan kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak lanjut perbaikan atas kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan, pengendalian pelaksanaan anggaran,struktur pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.Pengaruh terbesar ditunjukkan oleh perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Implikasi darihasil penelitian yaitu untuk meningkatkan kualitas LKPD,pemantauan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi hasil audit LKPD oleh auditor BPK harus diintensifkan,dengan prioritas pemantauan atas permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.

2.3 Kerangka berpikir

2.3.1 Inspektorat Kota Tanjung balai

Inspektorat juga dapat melakukan jasa audit lainnya yaitu menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas atas kinerja pemerintah daerah serta melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak jauh-jauh dari perannya sebagai pemberi pendapat atau kesimpulan dan pemberi konsultasi guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Kota Tanjung Balai . Dalam konteks penelitian ini, Inspektorat berperan sebagai subjek utama yang akan diteliti perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Inspektorat menjalankan fungsi-fungsi audit internalnya, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

2.3.2 Audit Internal

Audit internal merupakan suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas, kecukupan sistem pengendalian internal organisasi serta memberikan pendapat atau kesimpulan (Hanifah et al., 2023). Auditor Internal Inspektorat memiliki peran sebagai auditor internal pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan penilaian independen terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana auditor internal di Inspektorat Kota Tanjung Balai melaksanakan tugasnya, termasuk metodologi yang digunakan, standar yang diikuti, dan independensi mereka (Studi et al., 2023).

2.3.3 Quality Assurance (Penjamin Mutu)

Auditor internal berperan dalam penjaminan mutu laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan informasi yang akurat dan relevan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana auditor internal di Inspektorat Kota Tanjung Balai memastikan kualitas laporan keuangan, termasuk proses review yang dilakukan, identifikasi potensi risiko, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan.

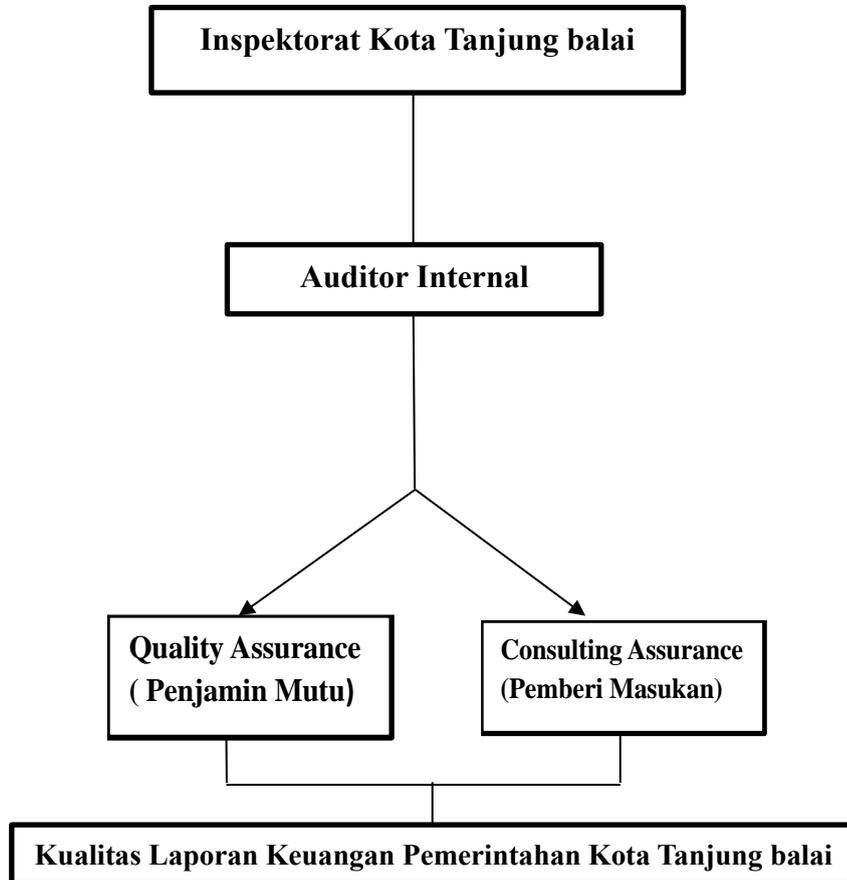
2.3.4 Consulting Assurance (Pemberi Masukan)

Auditor internal juga berperan sebagai pemberi masukan atau konsultasi untuk perbaikan laporan keuangan. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana auditor internal di Inspektorat Kota Tanjung Balai memberikan masukan kepada manajemen pemerintah daerah, termasuk jenis masukan yang diberikan, efektivitas komunikasi, dan implementasi rekomendasi.

2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tanjung Balai

Ini adalah tujuan yang ingin dicapai melalui peran auditor internal. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini akan mengukur dan mengevaluasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Kerangka Berpikir teoritis mengenai Analisis peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang bersifat naratif atau deskriptif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa jawaban yang diberikan oleh responden, kemudian dianalisis untuk menggali makna dan pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perspektif auditor internal, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Jenis penelitian deskriptif berfokus menggambarkan atau menggali secara rinci fenomena yang ada tanpa melakukan uji hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Badan Inspektorat Kota Tanjungbalai menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menggali bagaimana interaksi dan pengalaman yang dialami oleh auditor internal dalam menjalankan tugas pengawasan mereka yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang proses, interaksi, serta pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan audit laporan keuangan pemerintah.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Subjek

Yang menjadi subjek dari definisi operasional Kantor Inspektorat Kota Tanjung balai adalah pihak atau individu yang berperan aktif dalam proses penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, subjeknya adalah Inspektorat Kota Tanjungbalai sebagai auditor internal pemerintahan. Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan pemerintahan yang disusun oleh dinas-dinas terkait di Kota Tanjungbalai.

3.2.2 Objek

Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang menjadi fokus atau yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, objeknya adalah peran Inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan Kota Tanjungbalai. Definisi operasional objek penelitian adalah Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Yaitu Mengacu pada tindakan, kegiatan, atau fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan audit, pengawasan, serta evaluasi terhadap laporan keuangan dan proses akuntabilitas pemerintahan di Kota Tanjungbalai dan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Menunjuk pada tingkat akurasi, transparansi, ketepatan, dan ketaatan pada standar akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjung balai.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari kantor Inspektorat kota Tanjung balai yang ber Alamat di Jl. gaharu dan juga menggunakan website inspektorat.tanjungbalaikota.go.id.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Penyusunan Proposal																					
3	Bimbingan Proposal																					
4	Seminar Proposal																					
5	Revisi Proposal																					
6	Penelitian																					
7	Bimbingan Skripsi																					
8	Sidang																					

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan data kualitatif model, yaitu berupa penjelasan dari auditor inspektorat Tanjung balai. data ini mencakup berbagai data yang dapat diolah secara matematis dan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kualitas laporan keuangan Kota Tanjung balai.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui serangkaian wawancara tatap muka yang

terstruktur namun fleksibel dengan berbagai pihak yang memiliki peran kunci di kantor Inspektorat. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi mengenai berbagai aspek yang relevan dengan penelitian.

Adapun pihak-pihak yang menjadi sasaran wawancara adalah:

1. Inspektur

Sebagai pimpinan tertinggi di Inspektorat, wawancara dengan Inspektur bertujuan untuk mendapatkan visi, misi, arah kebijakan, serta strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan Inspektorat. Informasi ini krusial untuk memahami bagaimana Inspektur memandang peran dan fungsi Inspektorat dalam konteks organisasi yang lebih luas.

2. Sekretaris Inspektorat

Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat bertujuan untuk mendapatkan gambaran besar mengenai implementasi kebijakan, struktur organisasi yang berlaku, serta peran dan fungsi Inspektorat secara umum dalam konteks organisasi. Informasi ini krusial untuk memahami bagaimana Inspektorat beroperasi dan berinteraksi dengan unit kerja lainnya.

3. Fungsional Auditor dan Pengawas

Kelompok ini merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat terkait audit dan pengawasan. Wawancara dengan mereka akan difokuskan pada proses audit yang mereka lakukan, metode pengawasan yang mereka gunakan, tantangan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan, serta rekomendasi perbaikan yang mereka ajukan.

4. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan

Efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan faktor penting dalam kinerja Inspektorat. Wawancara dengan staf di sub bagian ini akan menggali informasi mengenai sistem dan prosedur administrasi yang diterapkan, pengelolaan anggaran, alokasi sumber daya, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

5. Sub Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi

Sub bagian ini bertanggung jawab atas perencanaan program kerja Inspektorat, analisis data kinerja, dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Wawancara dengan staf di sub bagian ini akan mengungkap bagaimana proses perencanaan dilakukan, metode analisis data yang digunakan, indikator kinerja yang dievaluasi, serta bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh responden, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi responden untuk menyampaikan informasi tambahan, pendapat, atau pengalaman yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan reliable. Dalam penelitian ini teknik dan pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada Beberapa Struktural yang terkait di Inspektorat Kota Tanjung balai. Adapun kisi-kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah :

Tabel 3.2 Kisi- kisi wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?
2.	Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota tanjung balai ?
3.	Apakah auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?
4.	Apakah auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?
5.	Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?
6.	Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung balai ?
7.	Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?
8.	Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?
9.	Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?
10.	Apakah harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data

yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan melalui rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi selama periode pengamatan. Adapun tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari Inspektorat kota Tanjung balai.
2. Menganalisis peranan inspektorat untuk menjalankan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Menganalisis faktor Penghambat yang dihadapi Inspektorat kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan delapan auditor internal di Kantor Inspektorat Tanjung Balai, ditemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tanggapan mereka mengenai berbagai aspek terkait pelaksanaan tugas auditor internal dalam melakukan audit laporan keuangan. Maka diperoleh jawaban :

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang diberikan oleh responden 1,2,3,4 dan 5,6, mengatakan bahwa iya, kami di Inspektorat Kota Tanjung Balai melakukan reviu atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Audit Pemerintahan (SAPM) yang berlaku. Kami memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah. Sedangkan responden 7 dan 8 mengatakan meskipun auditor internal telah memeriksa laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang ada di Inspektorat, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kedalaman audit. Beberapa laporan keuangan yang memerlukan analisis lebih mendalam atau verifikasi

terhadap data yang lebih kompleks terkadang tidak dapat diperiksa secara menyeluruh karena adanya keterbatasan ini . Sebanyak 75% (6 dari 8 responden) menyatakan bahwa auditor internal telah melakukan pemeriksaan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar audit pemerintahan. Namun, 25% (2 responden) menilai bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam keterbukaan hasil audit.

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung balai ?

Jawaban:

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,dan 6 mengatakan hal yang sama bahwa iya, Kami menyusun rencana audit tahunan (RAT) yang mencakup audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan. Perencanaan ini didasarkan pada risiko yang ada, sehingga pengawasan lebih efektif dan fokus pada area yang memiliki dampak besar terhadap kualitas laporan keuangan terhadap efektivitas pemeriksaan dan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit tahun sebelumnya dengan perencanaan audit yang matang, kami dapat memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Sebanyak 75% (6 dari 8 responden) menyatakan bahwa perencanaan audit sudah cukup matang dan sistematis. Sementara itu, 25% (2 responden) menilai masih ada kelemahan dalam aspek koordinasi dan ketepatan waktu pelaksanaan audit.

3. Apakah auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawaban :

Berdasarkan Kesimpulan yang di peroleh bahwa responden 1,2,3,4 dan 5 auditor internal di Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Mereka melakukan pengawasan terhadap seluruh sistem dan prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penyalahgunaan atau pelanggaran yang merugikan. Auditor internal juga memantau apakah ada celah dalam sistem pengendalian internal yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini, auditor internal berperan sebagai penjaga integritas laporan keuangan. Sebanyak 62,5% (5 dari 8 responden) menilai bahwa auditor internal telah melakukan pengawasan yang cukup terhadap pencegahan pelanggaran, namun 37,5% (3 responden) berpendapat bahwa pengawasan terhadap tindakan korektif masih kurang tegas.

4. Apakah auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawaban:

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3,4,5,dan 6 mengatakan hal yang sama bahwa iya, Kami menyusun rencana audit tahunan (RAT) yang mencakup audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan. Perencanaan ini didasarkan pada risiko yang ada, sehingga pengawasan lebih efektif dan fokus pada area yang memiliki dampak besar terhadap kualitas laporan keuangan terhadap efektivitas pemeriksaan dan Pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit tahun sebelumnya dengan perencanaan audit yang matang, kami dapat memastikan

kualitas laporan keuangan tetap terjaga. Sebanyak 75% (6 dari 8 responden) menyatakan bahwa perencanaan audit sudah cukup matang dan sistematis. Sementara itu, 25% (2 responden) menilai masih ada kelemahan dalam aspek koordinasi dan ketepatan waktu pelaksanaan audit.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintahan daerah ?

Jawaban :

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh responden 1,2,3 4,dan 5 iya, ketepatan waktu laporan audit sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jika laporan audit terlambat, maka tindak lanjut rekomendasi menjadi tertunda dan Kesalahan dalam laporan keuangan dapat berulang di tahun berikutnya sedangkan responden 6, 7 dan 8 mengatakan yang sama bahwa sangat berpengaruh jika laporan audit disampaikan tepat waktu, OPD bisa segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Sebaliknya, keterlambatan laporan audit dapat menyebabkan terulangnya kesalahan yang sama dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh responden (100% atau 8 dari 8 responden) sepakat bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Keterlambatan laporan audit dapat berdampak pada keterlambatan perbaikan dan pengambilan keputusan.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung balai ?

Jawaban :

Berdasarkan wawancara yang di peroleh bahwa responden 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 mengatakan hal yang sama yaitu kami memberikan yang lebih akurat rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil audit serta melakukan pendampingan kepada OPD dalam menyusun laporan keuangan dan sesuai standar. Kami juga mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman OPD mengenai tata kelola keuangan yang baik. Sebanyak 87,5% (7 dari 8 responden) menyatakan bahwa auditor internal telah memberikan masukan yang konstruktif, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Namun, 12,5% (1 responden) menilai bahwa masih diperlukan mekanisme yang lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawaban:

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara yang diperoleh kepada responden 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 mengatakan bahwa Beberapa tantangan yang kami hadapi yaitu Kurangnya pemahaman OPD tentang akuntansi pemerintahan, Kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan untuk mengatasi ini kami terus meningkatkan kapasitas SDM dan optimalisasi teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari jawaban responden, faktor utama yang menghambat adalah Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten (62,5%), Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan audit (50%) dan Kurangnya pemahaman OPD terkait standar akuntansi pemerintah (37,5%).

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawaban:

Berdasarkan kesimpulan wawancara oleh responden 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 mengatakan kami mengukur efektivitas rekomendasi berdasarkan tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, penurunan jumlah temuan berulang pada laporan keuangan berikutnya dan peningkatan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah kami juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi yang telah diberikan. Sebanyak 75% (6 dari 8 responden) menyatakan bahwa Inspektorat menggunakan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap rekomendasi yang diberikan. 25% (2 responden) berpendapat bahwa implementasi rekomendasi masih kurang optimal karena keterbatasan tindak lanjut dari OPD terkait.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawaban:

Berdasarkan kesimpulan responden 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 mengatakan peran kami cukup besar dalam menjaga kualitas laporan keuangan yaitu berupa membantu OPD memahami standar pemerintahan, Memberikan dalam menyusun keuangan berbasis dan mendampingi OPD dalam menindaklanjuti temuan audit dan meningkatkan pengendalian internal. Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah kesalahan sejak awal dan meningkatkan pemahaman OPD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 87,5% (7 dari 8 responden) menilai bahwa auditor internal memiliki peran yang cukup besar dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD. Namun, 12,5% (1 responden)

menyatakan bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawaban:

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh dari responden 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 mengatakan hal yang sama berupa harapan kepada seluruh OPD lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan dan patuh terhadap regulasi, Peningkatan kapasitas SDM auditor dan OPD dalam tata kelola keuangan dan Mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten dari BPK. Dari hasil tanggapan responden, harapan utama yang diinginkan adalah Peningkatan kompetensi auditor internal (75%),Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (62,5%) dan Adanya sistem digitalisasi dalam pelaporan keuangan (50%). Secara keseluruhan, mayoritas responden mengakui peran penting auditor internal dalam menjaga kualitas laporan keuangan di Kota Tanjung Balai, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam efektivitas pengawasan dan implementasi rekomendasi audit.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Peranan Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Kualitas

Laporan Keuangan

Badan Inspektorat Kota Tanjung Balai merupakan lembaga pengawas internal yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan yang baik adalah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam proses meraih opini WTP, Inspektorat Kota Tanjung balai berperan sebagai auditor internal yang melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan tersebut. Berikut adalah beberapa Peranan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan :

1. Melakukan Audit dan Pengawasan Keuangan Daerah Secara Berkala (87,5%)

Salah satu tugas utama Inspektorat Kota Tanjung balai adalah melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Audit ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam proses audit ini Inspektorat Kota Tanjung balai melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan, yaitu Pemeriksaan atas transaksi keuangan OPD, untuk memastikan bahwa pencatatan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi, Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna memastikan setiap pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Analisis efektivitas penggunaan anggaran, untuk mengukur efisiensi dalam

realisasi belanja daerah dan pencapaian target Pembangunan, Peninjauan sistem pengendalian internal di OPD. Agar dapat mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menyebabkan penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada OPD yang bersangkutan.

2. Memberikan Rekomendasi Perbaikan bagi OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan (75%)

Setelah melaksanakan audit, Inspektorat Kota Tanjung Balai memberikan rekomendasi perbaikan kepada OPD guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Beberapa rekomendasi yang sering diberikan meliputi:

1. Koreksi terhadap pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan SAP, sehingga data keuangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penguatan sistem pengendalian internal, untuk mencegah potensi kecurangan, kesalahan pencatatan, atau penyimpangan anggaran.
3. Peningkatan mekanisme pelaporan dan transparansi anggaran, agar laporan keuangan lebih mudah dipahami dan dievaluasi.

4. Penerapan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Inspektorat juga melakukan monitoring berkala terhadap OPD untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan telah diimplementasikan dengan baik.

3. Meningkatkan Kapasitas SDM di Kota Tanjung Balai dalam Penyusunan Laporan Keuangan (81,25 %)

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan laporan keuangan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Tanjung Balai harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, antara lain:

1. Mengadakan pelatihan dan workshop tentang sistem akuntansi pemerintahan, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Melaksanakan sosialisasi regulasi keuangan daerah, agar OPD selalu mengikuti perubahan kebijakan yang berlaku.
3. Memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada OPD, untuk membantu dalam perbaikan penyajian laporan keuangan.

Melalui peningkatan kompetensi SDM ini, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tanjung Balai dapat lebih baik dan lebih mudah dalam memenuhi standar WTP.

4. Mengawasi dan Mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal (78%)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan elemen kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Kota Tanjung Balai melakukan evaluasi terhadap efektivitas SPI yang diterapkan oleh setiap OPD dengan langkah-langkah berikut:

1. Menganalisis kelemahan dalam pengendalian internal, untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
2. Membantu OPD dalam menyusun prosedur pengendalian yang lebih ketat, guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
3. Memastikan implementasi pengendalian internal secara efektif, agar tata kelola keuangan daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Evaluasi yang baik terhadap SPI akan membantu Kota Tanjung Balai dalam mempertahankan atau meraih opini WTP.

5. Mencegah dan Menindak Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (85%)

Salah satu faktor yang dapat menghambat perolehan opini WTP adalah adanya indikasi kecurangan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu, Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peran dalam:

1. Mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran melalui audit investigatif.
2. Menerapkan mekanisme pelaporan whistleblowing, agar pelanggaran dapat dilaporkan oleh pegawai atau masyarakat.

3. Memberikan rekomendasi sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan fraud, guna memberikan efek jera dan meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan peranan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Melalui audit berkala, pemberian rekomendasi perbaikan, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan sistem pengendalian internal, serta upaya pencegahan dan penindakan kecurangan, Inspektorat mampu memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Mayoritas responden (rata-rata 80%) mendukung bahwa upaya yang dilakukan Inspektorat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, risiko penyimpangan keuangan dapat diminimalisir, sehingga anggaran daerah dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Inspektorat Kota Tanjung Balai diharapkan terus meningkatkan efektivitas pengawasannya dengan mengadopsi teknologi digital dalam proses audit dan pelaporan. Selain itu, sinergi antara Inspektorat, OPD, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Tanjung Balai dapat mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2. Faktor Penghambat yang Dihadapi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara responden dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kota Tanjung Balai menghadapi berbagai hambatan yang juga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan keuangan daerah di antaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten (30%)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dengan persentase sebesar 30%, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi proses pemeriksaan keuangan di Kota Tanjung Balai. Jumlah auditor yang tersedia masih sangat terbatas, sementara tenaga ahli di bidang akuntansi dan audit yang memiliki pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi serta regulasi keuangan yang berlaku juga masih minim. Kondisi ini menyebabkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan audit, seperti keterlambatan dalam melakukan reviu laporan keuangan serta meningkatnya risiko kesalahan dalam interpretasi dan penerapan kebijakan akuntansi yang seharusnya diterapkan. Dengan hanya 70% SDM yang tersedia dan memiliki kompetensi yang relatif beragam, efektivitas pemeriksaan keuangan menjadi kurang maksimal, sehingga dapat berdampak pada akurasi laporan keuangan yang dihasilkan. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, maka kualitas audit yang dilakukan akan semakin menurun, yang pada akhirnya dapat mengganggu transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, rendahnya kapasitas SDM yang memadai juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap tata

kelola keuangan pemerintah Kota Tanjung Balai, yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja administrasi keuangan daerah.

b. Rendahnya Kepatuhan OPD dalam Menyusun Laporan Keuangan yang Berkualitas (25%)

Tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas masih tergolong rendah, dengan persentase hanya mencapai 25%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak OPD yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara optimal dalam proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun sering kali mengalami keterlambatan dalam penyampaian serta ditemukan berbagai ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam regulasi keuangan daerah maupun nasional.

Rendahnya tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparatur OPD terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan, yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengklasifikasian akun, serta penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, minimnya pelatihan teknis yang diberikan kepada staf keuangan di OPD turut memperburuk kondisi ini, karena banyak pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Faktor lain yang berkontribusi adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian aparatur OPD terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa OPD masih menganggap bahwa

penyusunan laporan keuangan hanya sebagai tugas administratif yang bersifat formalitas semata, tanpa menyadari bahwa laporan keuangan yang baik merupakan alat penting dalam mencerminkan kondisi keuangan daerah secara akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Akibat dari pola pikir ini, banyak laporan keuangan yang disusun secara terburu-buru tanpa melalui proses reviu dan verifikasi yang cermat, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, ketidaktepatan penyajian data, serta ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang seharusnya diterapkan.

Dampak dari rendahnya kepatuhan OPD dalam menyusun laporan keuangan ini cukup serius. Selain berisiko menurunkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan, kondisi ini juga dapat berdampak negatif terhadap opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika laporan keuangan daerah dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih tegas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM di OPD melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala agar pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan semakin baik. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan OPD dalam menyusun laporan keuangan harus diperkuat dengan menerapkan mekanisme kontrol yang lebih ketat serta memberikan sanksi bagi OPD yang tidak patuh. Dengan adanya upaya perbaikan yang komprehensif, diharapkan kepatuhan OPD dalam

menyusun laporan keuangan dapat meningkat secara signifikan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung (20%)

Keterbatasan anggaran, dengan persentase sebesar 20%, menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan efektivitas proses audit dan pengawasan keuangan di Kota Tanjung Balai. Anggaran yang minim menghambat berbagai upaya peningkatan kapasitas auditor, termasuk dalam hal pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kompetensi di bidang akuntansi dan pemeriksaan keuangan. Tanpa alokasi dana yang memadai, sulit bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai untuk memastikan bahwa auditor memiliki keahlian yang cukup dalam menerapkan standar audit berbasis risiko, memahami regulasi terbaru, serta menggunakan teknologi audit yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemeriksaan keuangan.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pengadaan sarana dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses audit. Saat ini, banyak sistem pencatatan dan analisis keuangan masih dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak yang kurang optimal, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengolahan data serta memperlambat proses audit. Tanpa investasi yang cukup dalam teknologi modern, seperti sistem informasi keuangan terintegrasi, perangkat lunak audit berbasis data analytics, serta infrastruktur digital yang mendukung transparansi, efektivitas pengawasan keuangan daerah menjadi sangat terbatas.

Minimnya anggaran juga berpengaruh pada kemampuan Inspektorat untuk melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan sumber daya keuangan yang terbatas, Inspektorat tidak dapat menjalankan fungsi pemeriksaan secara optimal, baik dalam hal jumlah audit yang dilakukan maupun kedalaman analisis yang dapat diterapkan pada setiap pemeriksaan. Akibatnya, beberapa potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah mungkin tidak terdeteksi secara dini, yang berisiko menurunkan kualitas tata kelola keuangan serta menimbulkan permasalahan dalam pelaporan keuangan daerah.

Di samping itu, keterbatasan dana juga berdampak pada kurangnya program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa adanya pelatihan yang rutin dan berkelanjutan, banyak pegawai yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang standar akuntansi pemerintahan, mekanisme pelaporan keuangan yang benar, serta prosedur audit yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat memperburuk permasalahan kepatuhan OPD dalam menyusun laporan keuangan serta meningkatkan risiko kesalahan dalam penyajian data keuangan.

Jika keterbatasan anggaran ini tidak segera diatasi, maka berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah akan semakin sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam bidang audit dan pengawasan keuangan, seperti mengusulkan peningkatan dana melalui kebijakan daerah, menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal untuk mendapatkan pendanaan tambahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang lebih hemat biaya namun tetap

efektif dalam mendukung proses audit. Dengan adanya dukungan anggaran yang lebih memadai, diharapkan Inspektorat Kota Tanjung Balai dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal, baik dalam hal pengawasan keuangan maupun peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam tata kelola keuangan daerah.

d. Intervensi dari Pihak-Pihak Berkepentingan (25%)

Intervensi dari pihak-pihak berkepentingan menjadi salah satu tantangan besar dalam proses audit keuangan di Kota Tanjung Balai, dengan persentase sebesar 25%. Tekanan dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit dapat menghambat independensi serta objektivitas Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Intervensi ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam lingkungan pemerintahan seperti pejabat daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun dari pihak eksternal seperti pemangku kepentingan politik, kelompok bisnis, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap anggaran dan laporan keuangan daerah.

Dalam banyak kasus, intervensi ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari permintaan untuk melonggarkan standar pemeriksaan, menutupi temuan audit yang berpotensi merugikan pihak tertentu, hingga upaya memengaruhi auditor agar memberikan opini yang lebih menguntungkan bagi instansi terkait. Tekanan semacam ini dapat membuat auditor berada dalam posisi sulit, di mana mereka harus memilih antara mempertahankan independensi profesional mereka atau menghadapi konsekuensi tertentu akibat tidak mengikuti keinginan pihak berkepentingan. Jika auditor tidak memiliki ketahanan profesional dan perlindungan kelembagaan yang kuat, maka risiko terjadinya kompromi terhadap hasil audit semakin besar.

Dampak dari intervensi semacam ini sangat signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jika auditor tidak dapat bekerja secara independen dan objektif, maka hasil audit yang dikeluarkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang disusun menjadi kurang transparan dan tidak akurat, sehingga menghambat upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, jika intervensi pihak berkepentingan dibiarkan terus terjadi, maka kredibilitas Inspektorat sebagai lembaga pengawas akan semakin melemah, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dapat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sistem audit keuangan daerah.

Lebih jauh lagi, intervensi yang tidak terkendali juga berisiko menghambat perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan daerah, serta menjadi cerminan dari kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Jika hasil audit sudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan tidak mencerminkan realitas keuangan yang sebenarnya, maka BPK dapat memberikan opini yang lebih rendah, seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Tidak Wajar (TW), yang tentunya akan berdampak buruk bagi citra dan kredibilitas pemerintah daerah.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret guna memperkuat independensi dan integritas Inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan audit, sehingga ada jaminan perlindungan bagi auditor yang menghadapi tekanan dari pihak berkepentingan. Selain itu,

penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif juga dapat menjadi instrumen penting untuk mendeteksi dan menindaklanjuti segala bentuk intervensi yang dapat merugikan objektivitas audit.

Lebih lanjut, Inspektorat perlu meningkatkan kapasitas dan ketahanan auditor dalam menghadapi tekanan eksternal dengan memberikan pelatihan khusus tentang etika audit serta strategi menghadapi intervensi. Selain itu, transparansi dalam proses audit juga harus diperkuat dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi keuangan yang memungkinkan hasil audit lebih mudah diakses serta diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dalam menjaga independensi dan profesionalisme auditor, diharapkan proses audit di Kota Tanjung Balai dapat berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, serta terbebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara responden, Inspektorat Kota Tanjung Balai menghadapi berbagai hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (30%), rendahnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan berkualitas (25%), keterbatasan anggaran dan sarana pendukung (20%), serta intervensi dari pihak-pihak berkepentingan (25%).

Keterbatasan SDM yang kompeten menghambat optimalisasi audit karena jumlah auditor yang terbatas serta kurangnya tenaga ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan. Rendahnya kepatuhan OPD dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan masih kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi

pemerintahan serta minimnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas audit, terutama dalam hal pelatihan auditor serta penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pemeriksaan keuangan. Sementara itu, intervensi dari pihak-pihak berkepentingan dapat mengganggu independensi auditor dan menurunkan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dampak dari permasalahan ini cukup signifikan, terutama terhadap akurasi laporan keuangan dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak segera diatasi, maka risiko ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi, keterlambatan audit, serta kemungkinan mendapatkan opini audit yang lebih rendah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, memperkuat sistem pengawasan terhadap kepatuhan OPD, meningkatkan alokasi anggaran untuk pengawasan keuangan, serta memperkuat regulasi guna menjaga independensi auditor dari intervensi pihak eksternal.

Dengan adanya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan di Kota Tanjung Balai dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas audit keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Tanjung Balai memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peranan ini meliputi audit berkala, pemberian rekomendasi perbaikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Namun, dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kota Tanjung Balai masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan SDM yang kompeten, rendahnya kepatuhan OPD, keterbatasan anggaran, serta intervensi dari pihak berkepentingan menjadi kendala utama yang harus diatasi agar pengawasan terhadap laporan keuangan daerah dapat berjalan optimal.

Jika tantangan-tantangan ini tidak segera ditangani, maka akan sulit bagi Kota Tanjung Balai untuk mempertahankan atau mencapai opini WTP dari BPK, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta alokasi dana dari pemerintah pusat.

5.2. Saran

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu :
 - a. Mengadakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi auditor internal agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam melakukan audit dan reviu laporan keuangan.
 - b. Merekrut tenaga ahli di bidang akuntansi dan audit guna menambah jumlah auditor yang kompeten.
2. Penguatan Regulasi dan Kepatuhan OPD, yaitu :
 - a. Menyusun kebijakan yang lebih tegas dalam mewajibkan OPD untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - b. Melakukan pengawasan lebih ketat terhadap implementasi sistem akuntansi di setiap OPD.
3. Penambahan Anggaran dan Sarana Pendukung, yaitu :
 - a. Meningkatkan alokasi anggaran bagi Inspektorat guna mendukung pengadaan teknologi audit yang lebih modern dan pelaksanaan pelatihan bagi auditor serta aparatur OPD.

- b. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah agar lebih efisien dan transparan.

4. Menjaga Independensi Inspektorat, yaitu :

- a. Memastikan bahwa setiap hasil audit dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak manapun.
- b. Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan audit dengan membuka akses informasi kepada masyarakat.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan Inspektorat Kota Tanjung Balai dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alves, P. A., Sanjaya, I. G. N., & Anggririawan, I. P. B. (2021). Pengaruh kompetensi audit internal dan kualitas jasa audit terhadap good corporate governance (GCG). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 17-21.
- Andini. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 33-41.
- Atiin, S., Khasanah, N., & Purwanto, D. A. (2022). Pada Situs Resmi Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ekonomi, T. J., Manajemen, A., April, N., Lakoro, F. S., Publik, A. S., Pemerintahan, F., Publik, S., Mandiri, U. B., Jl, A., Aloei, P. H., & Bolango, K. B. (2024). *Analisis Kualitas Audit Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo pemerintahan . Dimana dalam melaksanakan wewenangnyanya diharapkan mampu mengatur dan identifikasi kemungkinan apa yang menjadi perbedaan yang mencatat yang memberikan untuk menduk.* 2(2).
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24-36.
- Fallis, A. . (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Hanum, Z., Rahmadana, M. F., & Nasution, M. A. P. E. (2024). The Impact Of Auditor Competence And Auditor Experience On Audit Judgement, Mediated By Task Complexity, Within Public Accounting Firms In The City Of Medan. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e1925-e1925.
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Economina*, 2(6), 1318-1330. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Ihsan, M. H. (2018). Analisis peranan inspektorat sebagai auditor internal pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah kota prabumulih.
- Kharisma Hardiyanti, & Kania Nurcholisah. (2023). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Debt Maturity terhadap Efisiensi Investasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1-10. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1759>
- Lubis, H. Z., & Br Simatupang, S. N. (2021). Pengaruh Sikap Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia). UMSU.
- Lufriansyah, L. (2017). Due Professional Care Dalam Memediasi Pengaruh

- Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 39–5.
- Mardika, I. H. (2021). Peranan Aparatur Pemerintah Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Digital Akuntansi (JUDIKA)*, 1(1), 1–13.
- Maulana, E. (2021). Peran Inspektorat Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 276–280. <https://doi.org/10.31850/decision.v2i2.1403>
- Media, P., Momentum, P., Impuls, D. A. N., Sistem, B., Android, O., Meningkatkan, U., Berpikir, K., Siswa, K., & Aliyah, M. (2017). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Rialdy, N., Sari, M., Hani, S., Jufrizen, J., & Irfan, I. (2023). Internal Auditor Professionalism: Determinants and Its Effect on Behavior Auditor Ethics. *Integrated Journal of Business and Economics*, 7(3), 518-532.
- Oktavia, D. R. (2019). *Peran Inspektorat Sebagai Quality Assurance Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*.
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20–27. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Rahman, K. G., Said, S. N. R., & Putri, A. N. (2023). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Daerah. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 73-79.
- Rialdy, N., Sari, M., & Nainggolan, E. P. (2020). Model pengukuran kualitas audit internal (Studi pada auditor internal pada perusahaan swasta, BUMD dan BUMN di Kota Medan). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 210-226.
- Salsabila, M., Astuty, W., & Irfan, I. (2021). Pengaruh Pengalaman Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Akuntan Publik Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 281-294.
- Sari, E. N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh kompetensi dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada bpk ri perwakilan provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 81-92.
- Siregar, A. S. S., Sembiring, M. O., Deliana, D., & Napitupuluh, I. H. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kerja Audit Internal: Komitmen Profesional, Time Budget Pressure, dan Budaya Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(1), 28-34.
- Studi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *Analisis Kualitas Audit Dipengaruhi Faktor Individu*.
- Suherman, A. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 87. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15917>
- Lesmana, S., & Gunawan, A. (2007). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Yang Dipersepsikan Dan Strategi Kompetitif Terhadap Hubungan Sistem Kontrol Akuntansi Dengan Kinerja Perusahaan Perbankan Di Kota Medan. *Jurnal*

Riset Akuntansi Dan Bisnis, 7(2).

- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap Audit Report Lag. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.13.1.2021.1-13>
- Syarifudin Akhmad. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. *Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2014, 14(25)*, 26–44.
- YANA, W. (2023). *Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara)*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/222568>

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan salah satu auditor internal bersama ibu Uly Artha Siburian, S.E sebagai salah satu dari responden penelitian :





Nama : Uly Artha Sibuan, S.E

Jabatan : Pembina Tk.1/IV-b Auditor modya

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab :

Benar. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Audit Pemerintahan (SAPM).

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab :

- Pegawai Internal : Memastikan kesesuaian pencatatan keuangan
- Pengendalian Internal : Membenteng rekomendasi untuk perbaikan

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab :

Benar. Pengawasan dilakukan & audit investigasi jika terdapat indikasi pelanggaran dan penyimpangan teknis kepada OPD

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

RAT diarahkan mencakup audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan. Perencanaan dilakukan berdasarkan risiko yang ada, dan memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab :

Benar. Sangat berpengaruh. Jika tepat waktu, OPD bisa meningkatkan rekomendasi yang diberikan. Jika ada keterlambatan, akan ada kesalahan yang terulang.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab :

Memberikan rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil audit, atau melakukan pendampingan kepada OPD dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

- a. OPD kurang pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan.
- b. Tidak ada tindak lanjut ketika diberikan rekomendasi.
- c. Pengoptimalisasi teknologi yang kurang.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab :

Kami mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit berdasarkan tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.

Dan selalu melakukan monitoring & evaluasi atas rekomendasi.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Peran sangat besar. Karena kami bekerja dalam pemerintahan dan harus memahami standar pemerintahan. Kami mendampingi OPD dalam menindaklanjuti temuan audit guna mencegah kesalahan.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab :

Kepada seluruh OPD agar lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan & lebih terhadap regulasi.

Nama : Jerry Darmunthe, ST

Jabatan : Auditor madya pembina / IV-a

1. Apakah auditor internal di Inspektora Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab : Ya sesuai, namun meski sudah sesuai standar yang berlaku masih terdapat tantangan yaitu sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi audit

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab : Perannya sangat penting terutama dalam pemertasaan dan evaluasi terhadap kepatuhan Pemerintahan namun sering bermasalah dibagian pengetahuan maka perlu diadakan pelatihan demi meningkatkan sumber daya.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab : Walaupun peran auditor internal penting, keterbatasan wewenang kami bisa menjadi hambatan, tekanan politik dan Independensi auditor.

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab : Auditor internal umumnya pasti merencanakan audit yang matang namun, dalam praktiknya bisa terganggu seperti adanya kebijakan mendadak dan keterbatasan anggaran.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab : tentu berpengaruh besar terhadap kualitas audit namun jika sering tertambat ada kemungkinan rekomendasi yang diajukan tidak dapat langsung di implementasikan.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab: Memiliki peran aktif dalam memberi masukan melalui hasil audit auditor internal dapat memberikan masukan namun terkadang rekomendasi yang diajukan tidak segera dilaksanakan sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas audit/laporan keuangan.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab: Faktor penghambat tanpa sumber daya manusia yang terlatih dibidang akuntansi dan audit. dan lain sebagainya komitmen/dukungannya dari pihak-pihak terkait dipemerintahan daerah.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab: Inspektorat dapat mengukur efektivitas rekomendasi dengan memantau dan mengevaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan. point ini dikecualikan dengan benar oleh opp namun bisa terhambat oleh kurangnya pengawasan berkelanjutan atau keterbatasan sumber daya untuk evaluasi mendalam.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab: peran kami membantu opp memahami standar akuntansi dan prinsip keuangan yang benar, memberikan solusi, serta mengadakan kegiatan namun meskipun peran kami penting keterbatasan waktu dan sumber daya bisa menghambat kemampuan kerja.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab: Harapan saya umumnya keceptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan serai regulasi yang berlaku dan adanya perbaikan tingkat SDM, dan yang yang terdapat seperti keterbatasan anggaran, dan dukungan politik yang tidak konsisten.

Nama : Mahdalena Lubis, S.E

Jabatan : Auditor Madya Pembina Tk. 1/IV-b

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab :

Ya, saya mengaudit sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan (SAPM)

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab :

Sebagai pengawas internal, memastikan keefektifan pencatatan keuangan dengan standar yang berlaku, kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan penggunaan anggaran efektifitas sistem pengendalian internal di OPD

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab :

Ya, saya melakukan pengawasan audit reguler & Investigatif jika ditemukan indikasi pelanggaran dan OPD

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Ya, benar. RAT disusun. Mencakup audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap aturan.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab :

Benar, ketepatan waktu sangat berpengaruh. Jika laporan audit terlambat, tidak lanjut rekomendasi menjadi tertunda.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab :

Memberikan rekomendasi yang lebih akurat, melakukan penyalpungan kepada OPD dalam menyusun laporan keuangan dan sesuai dengan standar.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

OPD yang kurang pemahaman terhadap akuntansi Pemerintahan, kurangnya peningkatan kapasitas di SDM.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab :

Mengukur efektivitas rekomendasi berdasarkan tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan penyalpungan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Membantu OPD memahami Standar Pemerintahan dan Merencanakan dalam peningkatan Pengendalian Internal.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab :

Agar OPD lebih disiplin dalam pelaksanaan keuangan dan patuh terhadap regulasi.

Nama : HJ. SITI RUGAYAH, S.E

Jabatan : Auditor Madya Pembina Tk. I/IV-b

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab :

Ya, di Inspektorat Kota Tanjung Balai melakukan riviur atas laporan keuangan sesuai SAP dan SIMM yang berlaku laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai yang berlaku di pemerintahan.

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab :

Kami berperan sebagai pengawas internal yang memartikan keresuaian pencatatan keuangan dengan standar yang berlaku.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab :

Ya, Kami melakukan pengawasan audit reguler dan audit investigatif.

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Ya, Kami menyusun rencana audit tahunan (RAT) yang mencakup audit, tenaga, dan kepatuhan terhadap aturan.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab :

Ya, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab :

Kami yang lebih akurat rekomendasi perbaikan dalam laporan hasil audit. Serta melakukan Pendampingan kepada OPD sesuai standar.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Terdapat beberapa kurangnya pemahaman OPD tentang akuntansi pemerintahan.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab :

Kami mengukur efektivitas rekomendasi berdasarkan tingkat OPD dalam rekomendasi audit pada laporan keuangan.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Kami berperan besar dalam membantu OPD memahami standar pemerintahan.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab :

Harapan saya, agar seluruh OPD lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan.

Nama : Dessi Yunda Wn, s.E, M.A.P
Jabatan : Auditor Madya Pembina Tk.1/IV-b

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab :

Ya, kami melakukan revidar laporan keuangan sesuai SAP dan SAPM yang berlaku.

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab :

Kami sangat berperan sebagai pengawas internal untuk memastikan kesesuaian dalam pencatatan keuangan.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab :

Ya, kami melakukan pengawasan untuk audit reguler dan audit investigatif.

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Ya, setiap tahun kami menyusun rencana audit tahunan (RAT) untuk mencakup pelaporan audit, kinerja dan kepatuhan.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab :

Ya, ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab :

Kami merekomensi perbaikan dalam laporan hasil audit . dengan standar yang berlaku.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Kurangnya pemahaman OPD tentang akuntansi pemerintahan.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab :

Kami mengukur berdasarkan tingkat OPD dalam merekomendasikan audit pada laporan keuangan.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab :

Kami memiliki peran besar dalam membantu OPD memahami standar pemerintahan.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab :

Harapan saya, agar seluruh OPD lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan.

Nama : Mariyesti, ST
Jabatan : Auditor muda Penata Tk.1/III-d

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai ketepatan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab : Ya, kami memeriksa sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab : Berperan sebagai pengawas internal yang memastikan kesesuaian pencatatan keuangan yang berlaku.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab : Ya melakukan pengawasan berupa audit reguler, seperti bimbingan teknis kepada DPO.

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab : Iya kami sudah melakukan perencanaan audit yang matang demi mendukung upaya auditor internal dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab : Jika Laporan audit terlambat maka akan mempengaruhi terlanjarnya kesesuaian dalam penyusunan laporan keuangan pada berikutnya.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab: Kami berupaya sebagai pendamping opd dalam menyusun laporan keuangan dan sesuai standar.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab: berbagai faktor yaitu seperti SDM yang ada kurang mendukung dalam pelaksanaannya dan kurangnya pemahaman opd terhadap Akuntansi.

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab: Kami mengukur berdasarkan peningkatan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab: Kami berperan sebagai pendamping opd dalam menindak lanjut temuan audit dalam peningkatan pengendalian internal.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab: 1. Peningkatan SDM auditor dan opd agar bisa konsisten terhadap mendapatkan opini WTP.

Nama : R. Mawati sitong s.E
 Jabatan : Auditor muda Penata / III - c

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai keputusan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab : Ya, kami melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan standar Audit pemerintahan (SAPM).

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab : Kami berperan sebagai pemberi rekomendasi untuk perbaikan laporan keuangan sebelum dibenarkan / dilayukan ke BPK.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan peninduk pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab : Ya, kami melakukan pengawasan audit investigatif jika terjadi pelanggaran demi mencegah kesalahan.

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab : Ya, kami melakukan perencanaan audit yang mendukung auditor internal dalam menjaga kualitas laporan keuangan guna memastikan kualitas laporan keuangan tetap terjaga.

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab : Ya sangat mempengaruhi karena jika terlambat tidak lanjut rekomendasi menjadi tertunda.

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab: Kami memberikan yang lebih akurat rekomendasi-pastikan dalam laporan hasil audit serta pendampingan opp dalam menyusun Laporan Keuangan.

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab: 1. SOM
2. pengetahuan mengenai Akuntansi

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab: Kami mengukur berdasarkan tingkat kepatuhan opp dalam menindaklanjuti rekomendasi audit.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab: Cukup besar peran kami sebagai pendamping dan konsultan dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab: harapan saya, agar opp lebih disiplin lagi dalam menjaga tata kelola keuangan agar tahun kedepannya tetap merah WTP.

1. Apakah auditor internal di Inspektorat Tanjung Balai telah memeriksa kualitas laporan keuangan sesuai kepatuhan standar audit pemerintahan yang diterapkan ?

Jawab : Ya, kami melakukan pemeriksaan sesuai standar Akuntansi pemerintahan (SAP) / SAPA

2. Bagaimana peran yang dilakukan auditor internal dalam menjamin mutu laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Kota Tanjung Balai ?

Jawab : Kami berperan sebagai pemberi rekomendasi untuk perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Apa auditor internal melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penindak pelanggaran dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah ?

Jawab : Iya kami melakukan pengawasan demi mencegah pelanggaran dalam kualitas laporan keuangan pemerintahan

4. Apa auditor internal sudah melakukan perencanaan audit yang matang dalam mendukung upaya auditor internal menjaga kualitas laporan keuangan ?

Jawab : Iya kami sudah melakukan perencanaan audit yang matang demi menjaga kualitas laporan keuangan

5. Apakah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan ?

Jawab : Sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

6. Bagaimana upaya auditor internal dalam memberi masukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Inspektorat Tanjung Balai ?

Jawab: Kami berupaya sebagai pendamping OPD dalam menyusun / mengawasi Laporan Keuangan

7. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Inspektorat Kota Tanjung Balai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ?

Jawab: Faktornya berupa SDM yang belum memahami standar Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan

8. Bagaimana Inspektorat mengukur efektivitas rekomendasi hasil audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan?

Jawab: Kami mengukur efektivitas melalui penilaian BPK terhadap opini audit.

9. Seberapa besar peran auditor internal dalam memberikan pendampingan atau konsultasi kepada OPD dalam meniga kualitas laporan keuangan ?

Jawab: Sangat besar karena tanpa pendamping OPD akan kesusahan dalam menyusun laporan keuangannya.

10. Apa harapan auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ke depannya ?

Jawab: harapan saya agar pemerintahan kota Tanjung Balai lebih meningkatkan bimbingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan agar bisa mencapai target yang diinginkan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 255 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/10/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/10/2024

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MALIKA AYU
NPM : 2105170239
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas audit dalam mencegah kecurangan 2. Optimalisasi auditor terhadap laporan keuangan tahun 2024 sehingga meraih penilaian WTP setelah 14 tahun dinyatakan tidak 3. Terdapat Auditor yang tidak memenuhi kode etik profesi sehingga menimbulkan persepsi yang buruk terhadap sikap Profesionalisme, kecerdasan emosional dan motivasi kerja yang mengakibatkan kinerja auditor menurun

Rencana Judul : 1. Analisis Efektivitas Prosedur Audit Terhadap Keandalan laporan keuangan dalam mencegah kecurangan
2. Analisis Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penilaian auditor
3. Pengaruh Profesionalisme, Kecerdasan Emosional dan motivasi kerja terhadap kinerja auditor

Objek/Lokasi Penelitian: Kantor Inspektorat kota Tanjung balai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(MALIKA AYU)

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 255/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/10/2024

Nama Mahasiswa	: MALIKA AYU
NPM	: 2105170239
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Pemeriksaan
Tanggal Pengajuan Judul	: 28/10/2024
Nama Dosen pembimbing ¹⁾	: M. Fahni Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., oCPA (06 November 2024)

Judul Disetujui²⁾ : faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi Auditor di Kota Tanjung Balai

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Asbc, Prof. Dr. Hj. Zulfa Hanum, S.E.,
MSI)

Medan, 16 Desember 2024

Dosen Pembimbing



1) Ditanda-tangani oleh Ketua dan Dosen Pembimbing, sesuai dengan persyaratan ke-2 (a) pada lampiran "Uraian persyaratan Judul Skripsi"
2) Ditanda-tangani oleh Ketua dan Dosen Pembimbing, sesuai dengan persyaratan ke-2 (a) pada lampiran "Uraian persyaratan Judul Skripsi"

Lampiran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online
2 dari 2 halaman

Halaman ke



Universitas Yth.
Dekan
Fakultas Ekonomi
Mahammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 30 Januari 2025

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MALIK AYU

Nomor : 2109170239

Tgl Lahir : TANJUNG BALAI, 22 SEPTEMBER 2002

Program Studi : Akuntansi /Manajemen / Ekonomi.Pembangunan

Nama Mahasiswa : JLEKA SUKYA

Lokasi Penelitian : KANTOR INSPEKTORAT

Kota Penelitian : KOTA TANJUNG BALAI

Menyampaikan kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Demikian saya lampirkan syarat-syarat lain :

Surat SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., Msi)

MALIKA AYU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1748/BAN-PT/2014/PT/10/2014
 Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id umsu.ac.id

Nomor : 277/IL3-AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 30 Rajab 1446 H
 30 Januari 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
 Kantor Inspektorat Daerah Kota Tanjung Balai
 Jln. Gaharu No.12 Kel. Sirantau, Kec. Dutuk Bandar, Kota Tanjung Balai
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Malika Ayu
 Npm : 2105170239
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




 Dekan
Dr. H. Hambri, SE., MM., M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Peringgal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Single Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/SAMPT/2017/PT/2014
Pusat Administrasi Jalan Muhtar Bani No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id febi@umsu.ac.id E:umsumedan U:umsumedan Q:umsumedan W:umsumedan

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 277/TGS/ILJ-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Malika Ayu
N P M : 2105170239
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai

Dosen Pembimbing : M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., nCPA

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 30 Januari 2026
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Rajab 1446 H
30 Januari 2025 M


 Dekan
Dr. H. Zuhri, S.E., MM, M.Si., CMA
 NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal








PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Gaharu No. 12 Telp (0623)-94320 Tanjungbalai - 21368

Tanjungbalai, 05 Februari 2025

Nomor : 800/183/Insp/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 277/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 30 Januari 2025 hal Izin Riset Pendahuluan, atas nama Mahasiswa :

Nama : Malika Ayu
NIM : 2105170239
Program Studi : Akuntansi

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas kami terima untuk melaksanakan Riset Pendahuluan di Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



INSPEKTUR DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI

Drs. FITRA HADI, M.I.Kom
PEMBINA UTAMA MUDA / IV-c
NIP. 19740910.199402.1.002

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MALIKA AYU
 N.P.M : 2105170239
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TANJUNG BALAI

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Februari 2025
 Pembuat Pernyataan



MALIKA AYU

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Malika Ayu
 NPM : 2105170239
 Dosen Pembimbing : Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan
 Judul Penelitian : Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pertakik fenomena, fenomena dan hasil penelitian.	1/1-25	f.
Bab 2	Tuliskan teori dan pahami kerangka konsep.	11/1-25	f.
Bab 3	Tentukan analisis data dipertakik.	11/1-25	f.
Daftar Pustaka	Pakai Mardotay.	10/1-25	f.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Buat Berumur.	10/1-25	f.
Persetujuan Seminar Proposal	Done	11/1-25	f.

Medan, Februari 2025

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si) (Muhammad Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 24 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Mulka Ayu*
 NPM. : *2105170239*
 Tempat / Tgl.Lahir : *Tanjung Balai, 22 September 2002*
 Alamat Rumah : *Jln. Eka sarya Medan Johor*
 Judul Proposal : *Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>latar belakang kurang, Identifikasi masalah diperjelas</i>
Bab II	<i>kurang ditambahkan</i>
Bab III	<i>Jenis penelitian diperjelas jenis sumber data. diperbaiki</i>
Lainnya	<i>gunakan penelitian acuan buku pedoman atau jurnal Dosen AECT UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 24 Februari 2025

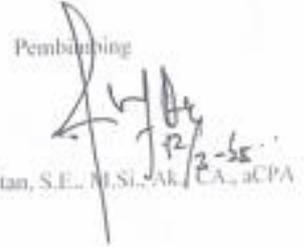
TIM SEMINAR

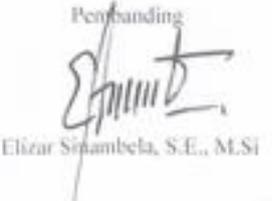
Ketua

 Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hani, S.E., M.Si

Sekretaris

 Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

 M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak./CA., CPA

Penbanding

 Elizar Simambela, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 24 Februari 2025* menerangkan bahwa:

Nama	: Malika Ayu
NPM	: 2105170239
Tempat / Tgl.Lahir	: Tanjung Balai, 22 September 2002
Alamat Rumah	: Jln.eka surya Medan Johor
Judul Proposal	: Analisis Peranan Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Balai

Proposal dinyatakan *syah* dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA*

Medan, 24 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. *Zulia Hanum, S.E., M.Si*

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

M. Fahmi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA

Pembimbing

Elizar Sitambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

u.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. *Ade Guruhwan, S.E., M.Si*

NIDN : 0105007601



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Gaharu No. 12 Telp (0623)-94320 Tanjungbalai - 21366

Tanjungbalai, 10 Maret 2025

Nomor : 810/ /Insp/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 377/IL.3-AU/UMSU-10/F/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal Selesai Riset atas nama Mahasiswi :

Nama : Malika Ayu
NIM : 2105170239
Program Studi : Akuntansi

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi tersebut telah menyelesaikan riset di Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
Drs. FITRA HADI, M.I.Kom
PEMBINA UTAMA MUDA / IV-c
NIP. 19740910.199402.1.002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Malika Ayu
NPM : 2105170239
Tempat /Tgl Lahir : Tanjung Balai, 22 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Eka Surya Medan Johor
Anak Ke : 3 dari 5 bersaudara
Email : malikaayu2209@gmail.com
No Hp/ WA : 0813-6058-9904

Nama Orang Tua

Ayah : Sudirman
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Maria Santifa
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. H. M. Nur Gg. Suka Riang Lk. II
No. Telepon : 0821-6026-6866

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 13 Sei Rotan Tamat Tahun 2015
2. SMP Negeri 1 Tanjung Balai Tamat Tahun 2018
3. SMA Plus Al-Azhar Medan Tamat Tahun 2021
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s/d Sekarang

Medan, Maret 2025

Malika Ayu